

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2024
								<input checked="" type="checkbox"/>					

## Empat OPD Diduga Akali Belanja Barang dan Jasa

**BANDARLAMPUNG** - Belanja barang dan jasa pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) diduga akal-akalan.

Hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemkab Lamteng tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung. Penanggung Jawab Pemeriksaan BPKRI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada

Baca | EMPAT | Hal. 6

### Empat..

Sambungan dari Hal. 1

2 Mei 2024 menjelaskan, khusus belanja barang terealisasi Rp86.181.330.104 atau 82,49 persen. Sedangkan belanja jasa terealisasi Rp166.259.071.105 atau 88,97 persen.

Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran dan penyedia jasa atas belanja barang dan jasa pada beberapa OPD menunjukkan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa melalui e-katalog dan langsung belum sesuai kondisi senyatanya.

PPTK menggunakan perusahaan penyedia yang tersedia di daftar penyedia lokal dalam rangka membuat kesepakatan terkait pemantauan perusahaan tersebut untuk pencairan.

Terdapat pembayaran atas belanja melalui e-katalog dan langsung yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Pertama, pembayaran belanja bahan-bahan baku sebesar Rp53.660.112 pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi senyatanya.

Anggaran belanja bahan-bahan baku sebesar Rp4.392.866.420 direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.540.366.646 atau 80,59 persen dari anggaran.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja dan konfirmasi dengan pihak PPK, PPTK, bendahara pengeluaran serta penyedia menunjukkan terdapat belanja bahan-bahan baku berupa alat kebersihan kantor yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp53.660.112 pada Sekretariat DPRD.

Kedua, pembayaran belanja alat/bahan sebesar Rp48.276.562 pada tiga OPD tidak sesuai kondisi senyatanya. Anggaran belanja alat/bahan tahun 2023 sebesar Rp31.591.660.572 dengan realisasi sebesar Rp26.265.712.313 atau 83,14 persen dari anggaran.

Realisasi belanja alat/bahan kegiatan kantor dibayarkan secara non tunai melalui mekanisme UP, GU, dan LS.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja serta konfirmasi dengan pihak PPK, PPTK, bendahara

pengeluaran serta penyedia menunjukkan terdapat belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp48.276.562 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Ketiga, pembayaran belanja makanan dan minuman sebesar Rp131.736.155 pada tiga OPD tidak sesuai kondisi senyatanya. Anggaran belanja makanan dan minuman tahun 2023 sebesar Rp22.825.200.000 dengan realisasi sebesar Rp14.204.413.306 atau 62,23 persen dari anggaran.

Realisasi belanja makanan dan minuman dibayarkan secara non tunai kepada pelaksana kegiatan melalui mekanisme UP, GU, dan LS.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja serta konfirmasi dengan pihak PPK, PPTK, bendahara pengeluaran dan penyedia menunjukkan terdapat belanja yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp131.736.155 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Sekretariat DPRD.

Keempat, pembayaran belanja pemeliharaan sebesar Rp38.132.000 pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi senyatanya. Anggaran belanja pemeliharaan sebesar Rp29.922.345.850 direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp26.437.542.858 atau 88,35 persen dari anggaran.

Pembayaran untuk belanja pemeliharaan dilakukan secara non tunai kepada pelaksana kegiatan melalui mekanisme UP, GU dan LS.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja baik yang dilampirkan dalam SPJ maupun yang baru disusulkan saat pemeriksaan serta konfirmasi dengan pihak PPTK, bendahara pengeluaran dan penyedia menunjukkan terdapat belanja yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp38.132.000 pada Sekretariat DPRD.

Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp271.804.829 telah ditindaklanjuti Pemkab

Lamteng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan melakukan penyetoran sebagian ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp77.480.242.

Rinciannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai STS tanggal 18 April 2024 sebesar Rp13.649.200; Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sesuai STS tanggal 19 April 2024 sebesar Rp10.294.510; dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai STS tanggal 26 April 2024 sebesar Rp53.536.532.

Sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp194.324.587. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp194.324.587.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala OPD tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada OPD yang dipimpinnya; PPK dan PPTK terkait dalam melaksanakan fungsinya tidak memedomani peraturan serta tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Lampung Tengah melalui Kepala OPD terkait menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad agar memerintahkan kepala OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Menginstruksikan PPK dan PPTK terkait supaya memedomani peraturan dalam melaksanakan fungsinya serta cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.

Serta memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja barang dan jasa sebesar Rp194.324.587 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah. (pip/c1/fik)